



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018  
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Semarang, 25 Maret 2019

---

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam sejahtera untuk Kita semua dan Kami sampaikan selamat pagi.**

- Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;**
- Ykh. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;**
- Ykh. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;**

**Jajaran Eksekutif dan hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Secara teknis LKPJ ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD. Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 juga telah menindaklanjuti Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2017, yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 22 Tahun 2018.

Izinkan saya membacakan ringkasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018, yang secara lengkap telah tersaji dalam Buku II.

Penduduk Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan proyeksi BPS sebanyak 34.490.835 jiwa, terdiri dari penduduk usia produktif berumur 15-64 tahun sebanyak 23.363.185 jiwa, lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas, sebanyak 11.127.650 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 5,32% meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 5,26% dan lebih tinggi dibanding nasional 5,17%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum mencapai target sebesar 5,9%, antara lain karena pengaruh pertumbuhan impor luar negeri yang cukup tinggi pada tahun 2018 yaitu 32,61%, yang menjadi faktor pengurang dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 sebesar Rp36,78 juta meningkat sebesar 7,48% dibanding PDRB per kapita Tahun 2017 sebesar Rp34,22 juta.

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mampu mengendalikan inflasi di bawah tiga persen yaitu 2,82%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2017 sebesar 3,71%. Inflasi Jawa Tengah juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,13%. Penurunan laju inflasi dikonstruksi kelompok bahan makanan khususnya sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya.

Selama tahun 2018 nilai ekspor total Jawa Tengah mencapai 6.587,77 juta US\$, atau naik 9,95% dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nilai 5.991,37 juta US\$. Ekspor Jawa Tengah didominasi oleh barang non migas sebanyak 97,72% mencapai 6.437,42 juta US\$, atau naik 11,62% dibanding tahun 2017 dengan nilai 5.767,44 juta US\$.

Impor Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 14.779,38 juta US\$, atau naik 38,67% dibandingkan tahun 2017. Impor Jawa Tengah didominasi impor non migas sebanyak 61,87% mencapai 9.144,12 juta US\$, atau naik 41,32% dibandingkan tahun 2017 sebesar 6.470,59 juta US\$. Namun impor non migas belum mencapai target yang diharapkan sebesar 5.729 juta US\$, karena meningkatnya impor non migas berupa mesin dan pesawat mekanik serta peralatannya sebesar 102%, serta mesin dan alat listrik serta perlengkapannya sebesar 53%, berkaitan dengan adanya proyek strategis nasional di Jawa Tengah dan pembangunan PLTU Batang. Impor non migas tersebut menyumbang 29,37% dari total impor non migas Jateng.

Indeks Williamson sebagai parameter tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah pada tahun 2018 belum dirilis oleh BPS (bulan Juli 2019). Indeks Williamson pada tahun 2017 berada pada angka 0,6234 sedikit lebih tinggi dari angka tahun 2016 sebesar 0,6210. Sedangkan ketimpangan pendapatan perkapita yang ditunjukkan dengan

Indeks Gini tahun 2018 berada pada angka 0,357 (angka September yang dirilis bulan Januari 2019). Indeks Gini belum mencapai target sebesar 0,337, karena tingkat variasi pendapatan penduduk kota yang tinggi sebagai dampak dari kompleksitas kegiatan di kota, sehingga gini rasio penduduk kota masih tinggi. Angka tersebut turun 0,08 poin dibandingkan tahun 2017 dan dibawah Nasional sebesar 0,384, yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di Jawa Tengah semakin membaik dan lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

Penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2018 sebanyak 3,867 juta jiwa atau 11,19% dari total jumlah penduduk (angka September 2018 yang dirilis BPS bulan Januari 2019). Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 330 ribu jiwa atau turun 1,04% dibandingkan September 2017 yaitu sebesar 12,23%. Penurunan jumlah penduduk miskin belum mencapai target sebesar 10,40%, antara lain karena tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, berkaitan dengan tingginya impor luar negeri, sehingga berdampak pada capaian realisasi indikator kemiskinan. Meskipun presentase jumlah penduduk miskin masih di bawah target, namun penurunan persentase penduduk miskin Jawa Tengah merupakan penurunan tertinggi se-Indonesia. Penanganannya diupayakan melalui berbagai program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, pengembangan usaha kecil dan mikro, sinergitas dan peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor.

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 sebesar 4,51%, sesuai rilis data BPS pada bulan Agustus. Angka tersebut belum mencapai target sebesar 4,13%, karena pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tidak tercapai, sehingga penyediaan kesempatan kerja belum mampu menurunkan

tingkat pengangguran sesuai yang diharapkan. Dibandingkan tahun 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 turun 0,06 poin sebesar 4,57%. Angka ini masih dibawah jumlah pengangguran terbuka tingkat Nasional, yaitu 5,34%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018 belum dirilis oleh BPS (bulan April 2019). IPM tahun 2017 sebesar 70,52 mengalami kenaikan sebesar 0,54 poin dibandingkan Tahun 2016, dan termasuk dalam kategori tinggi dengan interval nilai antara 70 – 80, sekalipun masih sedikit dibawah IPM Nasional sebesar 70,81.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2018 belum dirilis oleh BPS (bulan Agustus 2019). IPG Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 91,94 di atas IPG Nasional yaitu 90,96. IDG Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 75,10 diatas rata-rata Nasional yaitu 71,74, bahkan tertinggi se Jawa-Bali.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani. Pada tahun 2018 NTP di Jawa Tengah sebesar 102,25 naik 1,85 poin dari NTP 2017 sebesar 100,40, namun belum mencapai target sebesar 103,27. Dari sisi penerimaan petani, pada periode Februari sampai dengan Agustus terjadi penurunan harga komoditas karena over produksi pada saat musim panen. Di sisi lain terjadi pelemahan kurs nilai rupiah terhadap US\$, yang membuat harga barang-barang hasil industri yang dikonsumsi petani meningkat, sehingga indeks yang dibayar petani tinggi. NTP Jawa Tengah tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan NTP DKI Jakarta, Banten dan DIY, namun masih sedikit lebih rendah dibanding tingkat nasional yaitu selisih 0,21 poin.

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), selama kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung meningkat dari 60,84 pada tahun 2013 menjadi 70,85 pada tahun 2017. Peningkatan tersebut dipengaruhi meningkatnya ruang kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, hak memilih dan dipilih, peran DPRD, dan peran birokrasi Pemerintah Daerah. Adapun target IDI tahun 2018 sebesar 70,0 sudah terlampaui pada hasil IDI 2017, sedangkan IDI 2018 baru akan dirilis BPS pada sekitar Agustus 2019.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*" yang dijabarkan kedalam 7 Misi Pembangunan. Tingkat capaian masing-masing Misi pada Tahun 2018, dapat digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

**Misi 1:** Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 15 indikator, yaitu 12 indikator kinerja (85,71%) mencapai target, 2 indikator (14,29%) belum mencapai target, 1 indikator Indeks Demokrasi Indonesia belum dirilis oleh BPS (Agustus 2019). Namun demikian target indikator kinerja IDI tahun 2018 sudah tercapai pada tahun 2017 sebesar 70,85.

**Misi 2:** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 44 indikator, yaitu 33 indikator kinerja

(78,57%) mencapai target, 9 indikator kinerja (21,43%) belum mencapai target, dan 2 Indikator IPG dan IDG belum dirilis oleh BPS (Agustus 2019).

**Misi 3:** Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapus'*". Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 15 indikator, yaitu 13 indikator kinerja (86,67%) mencapai target dan 2 indikator (13,33%) belum mencapai target.

**Misi 4:** Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan. Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 9 indikator, yaitu 8 indikator (88,89%) mencapai target dan 1 indikator (11,11%) belum mencapai target.

**Misi 5:** Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak. Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 4 indikator, yaitu 2 indikator kinerja (66,67%) mencapai target, 1 indikator (33,33%) belum mencapai target, dan 1 indikator Indeks Wiliamson belum dirilis oleh BPS (Juli 2019).

**Misi 6:** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat. Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 23 indikator, yaitu 18 indikator (90%) mencapai target, 2 indikator kinerja (10%) belum mencapai target, dan 3 indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama Sekolah belum dirilis oleh BPS (April 2019).

**Misi 7:** Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Indikator Kinerja Sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 14 indikator, yaitu 13 indikator (92,86%) mencapai target dan 1 indikator (7,14%) belum mencapai target.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2018, pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari. Untuk mendorong pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 6 Prioritas Pembangunan Jawa Tengah. Gambaran capaian Indikator Kinerja Pembangunan yang mendukung ke 6 prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Prioritas Pertama:** Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Indikator kinerja pembangunan yang mendukung sebanyak 12 indikator, yaitu 8 indikator (66,67%) mencapai target dan 4 indikator (33,33%) belum mencapai target.

**Prioritas Kedua:** Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin. Indikator kinerja pembangunan yang mendukung sebanyak 5 indikator, seluruhnya mencapai target.



**Prioritas ketiga:** Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar. Indikator kinerja pembangunan yang mendukung sebanyak 12 indikator, seluruhnya mencapai target.

**Prioritas keempat:** Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas, serta pembangunan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. Indikator kinerja pembangunan yang mendukung sebanyak 19 indikator, yaitu 16 indikator kinerja (84,21%) mencapai target dan 3 indikator (15,79%) belum mencapai target.

**Prioritas kelima:** Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana. Indikator kinerja pembangunan yang mendukung sebanyak 18 indikator, yaitu 17 indikator kinerja (94,44%) mencapai target, 1 indikator kinerja (5,56%) belum mencapai target.

**Prioritas keenam:** Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Indikator kinerja pembangunan yang mendukung sebanyak 27 indikator, yaitu 23 indikator (88,46%) mencapai target, 3 indikator (11,54%) belum mencapai target, 1 indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia belum dirilis oleh BPS (Agustus 2019).

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Selanjutnya kami laporkan kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

**Pendapatan Daerah** Tahun Anggaran 2018 terealisasi sejumlah Rp24,701 Triliun, atau 99,54% dari target sejumlah Rp24,815 Triliun. Realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sejumlah

Rp997,84 Miliar atau 4,21%, dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu Rp23,703 Triliun.

Realisasi Pendapatan Daerah terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sejumlah Rp13,711 Triliun atau 102,35% dari target; Dana Perimbangan dengan realisasi sejumlah Rp10,933 Triliun atau 96,22% dari target; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan realisasi sejumlah Rp55,508 Miliar sesuai target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi 55,51%, Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 44,26% dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,22% terhadap Realisasi Pendapatan Daerah.

**Belanja Daerah** Tahun Anggaran 2018 dialokasikan sejumlah Rp26,186 Triliun terealisasi Rp24,660 Triliun atau 94,17%. Dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017, terdapat kenaikan sebesar 7,76%. Belanja Daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme belanja sesuai ketentuan yang berlaku.

**Penerimaan Pembiayaan** Tahun 2018 terealisasi sejumlah Rp1,511 Triliun dan **Pengeluaran Pembiayaan** terealisasi sejumlah Rp140 Miliar.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Hasil pelaksanaan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**, yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan 5 fungsi penunjang urusan pemerintahan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

**Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6 urusan, yaitu:**

**Urusan Pendidikan,** dilaksanakan dengan anggaran Rp10,631 Triliun, atau 40,60% dari total APBD, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp8,677 Triliun dan Belanja Langsung Rp1,880 Triliun. Realisasi fisik Belanja Langsung sebesar 99,25% dan realisasi keuangan 95,05%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dengan 51 indikator kinerja program yaitu 50 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target, yaitu bantuan siswa miskin, karena perubahan data hasil validasi dan kebijakan penundaan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pilkada.

Prestasi insan pendidikan yang diraih ditingkat nasional Tahun 2018 sebanyak 7 jenis, antara lain 15 medali emas pada Olimpiade Siswa Nasional, 22 medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, 14 medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan, 9 medali emas pada Festival dan Lomba Seni Nasional, 4 medali emas pada Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan 3 emas pada Olimpiade Guru Nasional.

**Urusan Kesehatan,** dilaksanakan dengan anggaran Rp1,917 Triliun. realisasi fisik sebesar 91,85% dan realisasi keuangan 74,96%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 8 program dengan 50 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Penghargaan yang diperoleh Tahun 2018 sebanyak 8 jenis penghargaan, antara lain Peringkat I dalam pengelolaan Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2016 - 2017 dari Pusdatin Kemenkes RI, penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pelaporan dan Pencapaian SPM dari Kemenkes RI, Penghargaan unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima Tahun 2018 kepada RSUD Tugurejo dari Kemenpan RB.

**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,** dilaksanakan dengan anggaran Rp907,96 Miliar. Realisasi fisik 98,13% dan realisasi keuangan 91,76%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 12 program, dengan 25 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 7 jenis penghargaan, antara lain Penghargaan Inovasi Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR, Pemenang I Daerah Irigasi Teladan Tingkat Nasional oleh Daerah Irigasi Serayu Kabupaten Banyumas, Juara I Kinerja Balai RBO-PB Balai Provinsi oleh Balai Pusdataru Bodri Kuto, Pemenang I Petugas O&P Irigasi Permukaan Teladan Tingkat Juru/Mantri oleh Mantri Pengelola Irigasi Kemantren Grinting dan Pemenang I Komunitas Peduli Sungai oleh Organisasi Peduli Sungai.

**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,** dilaksanakan dengan anggaran Rp6,56 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 87,46%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 2 program, dengan 2 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,** dilaksanakan dengan anggaran Rp60,77 Miliar, realisasi fisik 99,10% dan realisasi keuangan 93,84%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 7 program dengan 12 indikator kinerja program yaitu 10 indikator mencapai target, 1 indikator belum mencapai target sedangkan 1 indikator belum bisa disajikan karena datanya baru akan dirilis BPS Bulan Agustus 2019.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Dedikasi dan Pengabdian dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Jawa Tengah.

**Urusan Sosial**, dilaksanakan dengan anggaran Rp49,83 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,57%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 5 program dengan 12 Indikator Kinerja Program, seluruhnya mencapai target.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

**Kinerja 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, sebagai berikut:**

**Urusan Tenaga Kerja**, dilaksanakan dengan anggaran Rp23,55 Miliar, realisasi fisik 99,89% dan realisasi keuangan 96,32%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program dengan 9 indikator kinerja program yaitu 4 indikator mencapai target dan 5 indikator belum mencapai target, terkait dengan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 9 jenis penghargaan antara lain Penghargaan tingkat Nasional terbaik I Paritrana, Penghargaan terbaik Tingkat ASEAN untuk ASEAN Skills Competition (ASC) XII di Bangkok, Thailand serta Penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Tingkat Nasional untuk perusahaan kategori Zero Accident, SMK3, Penanggulangan HIV AIDS di tempat kerja dan Gubernur sebagai Pembina terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, dilaksanakan dengan anggaran Rp10,97 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,45%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program, dengan 10 indikator kinerja program yaitu 8 indikator mencapai target, dan 2 indikator IPG dan IDG belum dirilis oleh BPS (Agustus 2019).

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 3 jenis penghargaan, antara lain Anugerah Parahita Eka Praya Tahun 2018 dengan Kategori Mentor, sebagai bentuk perwujudan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, Penghargaan Anugerah Kencana.

**Urusan Pangan,** dilaksanakan dengan anggaran Rp17,44 Miliar. Realisasi fisik 99,44% dan realisasi keuangan 98,33%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 7 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Juara III Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal pada event peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional ke 38 di Banjarmasin.

**Urusan Pertanahan,** dilaksanakan dengan anggaran Rp3,72 Miliar, realisasi fisik 100% dan Realisasi keuangan 92,48%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program dengan 5 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

**Urusan Lingkungan Hidup,** dilaksanakan dengan anggaran Rp18,15 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,41%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 6 program, dengan 16 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Penghargaan Kampung Iklim tahun 2018 tingkat nasional diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2018, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,** dilaksanakan dengan anggaran Rp5,11 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,32%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 3 indikator kinerja program yaitu 2 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target, terkait dengan ketersediaan blangko e-KTP tergantung pusat.

**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,** dilaksanakan dengan anggaran Rp17,62 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,46%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 9 indikator kinerja program yang seluruhnya mencapai target.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 6 jenis penghargaan, antara lain Juara II Posyantek berprestasi tingkat nasional pada Gelar Teknologi Tepat Guna yang diwakili oleh Kabupaten Demak, Juara I pelaksana terbaik posyandu tingkat nasional atas nama Posyandu "Margo Makmur 1" Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora dan Juara Umum Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK tingkat nasional atas nama TP-PKK Provinsi Jawa Tengah.

**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,** dilaksanakan dengan anggaran Rp5,97 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,34%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dengan 8 indikator kinerja program yaitu 4 indikator mencapai target dan 4 indikator belum mencapai target, karena rendahnya partisipasi PUS untuk ber-KB dan kurangnya tenaga PLKB.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Anugerah Kencana Tahun 2018 sebagai bentuk perwujudan tingginya komitmen daerah dan dukungannya dalam menggerakkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

**Urusan Perhubungan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp59,64 Miliar, realisasi fisik 99,75% dan realisasi keuangan 94,88%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 11 indikator kinerja program yaitu 10 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target, terkait dengan pemeliharaan KMC Kartini dan penerapan sistem boardingpass di pelabuhan Tanjung Mas.

Prestasi tingkat nasional yang diperoleh yaitu apresiasi dari majalah Bandara dalam ajang Bandara Award 2018 di Hotel Borobudur dimana Gubernur Jawa Tengah dinyatakan sebagai Kepala Daerah yang berkomitmen tinggi dalam mendorong pengembangan Bandar Udara di Indonesia.

**Urusan Komunikasi dan Informatika**, dilaksanakan dengan anggaran Rp26,78 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,32%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program, dengan 7 indikator kinerja program yang seluruhnya mencapai target.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 8 jenis penghargaan, antara lain The Best Leader IT oleh Gubernur Jawa Tengah dari DataGovAi, LPSE Pemprov yang berkomitmen dalam penerapan SPSE CA oleh LPSE Pemprov Jateng dari LKPP, dan Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola SANGAT BAIK dari Indonesia Institute for Public Governance dalam Penganugerahan Pandu Negeri 2018, Penghargaan sebagai The Best Leader IT kepada Gubernur Jawa Tengah dari DataGovAi dalam Best IT & Data Tech Governance, Penghargaan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2018.



**Urusan Koperasi dan UKM,** dilaksanakan dengan anggaran Rp50,26 Miliar, realisasi fisik 99,71% dan realisasi keuangan 93,45%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dan 7 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

**Urusan Penanaman Modal,** dilaksanakan dengan anggaran Rp9,13 Miliar, realisasi fisik 99,18% dan realisasi keuangan 96,69%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 21 indikator kinerja program yaitu 19 indikator mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target, terkait dengan pemberlakuan aplikasi OSS yang belum disertai dengan terbitnya NSPK dan kurangnya perluasan usaha dari perusahaan penanam modal.

Prestasi tingkat nasional yang diperoleh sebanyak 2 jenis penghargaan, antara lain Peringkat Pertama Penyelenggaraan PTSP Provinsi terbaik di Indonesia pada "Investment Award 2018" dan Penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik predikat sangat baik kategori dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.

**Urusan Kepemudaan dan Olahraga,** dilaksanakan dengan anggaran Rp236,62 Miliar, realisasi fisik 99,73% dan realisasi keuangan 95,31%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 6 program, dengan 12 indikator kinerja program, yaitu 11 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target, terkait dengan pembangunan Stadion Jatidiri.

**Urusan Statistik,** dilaksanakan dengan anggaran Rp1,30 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,38%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program dengan 3 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

**Urusan Persandian**, dilaksanakan dengan anggaran Rp2,80 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,78%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program dengan 1 indikator kinerja program telah mencapai target.

**Urusan Kebudayaan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp20,92 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 88,00%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 24 indikator kinerja program yaitu 23 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target, terkait dengan pengembangan sarana seni budaya.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 3 jenis penghargaan, antara lain Penghargaan Juara II lomba Keindahan, Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan Wilayah Provinsi Anjungan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dari Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, Penghargaan Penyaji Unggulan pada Parade Lagu Daerah KE-35 "Gita Permata Nusantara" Taman Mini Indonesia Indah dari Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah.

**Urusan Perpustakaan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp6,33 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,95%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program, dengan 7 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 5 jenis penghargaan, antara lain Perpuseru Award 2018 "Honorable Mention" dari Coca Cola Foundation Indonesia atas dedikasi dan komitmen mengembangkan perpustakaan, Tim Sinergi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Terbaik Tahun 2018 dari Coca Cola Foundation Indonesia, untuk pengembangan dan berkelanjutan transformasi perpustakaan untuk kesejahteraan masyarakat, Juara II Klaster A Lomba Perpustakaan Desa

Tingkat Nasional Tahun 2018 yang diraih Perpustakaan Muda Bakti Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

**Urusan Kearsipan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp3,39 Miliar, realisasi fisik 100% dan keuangan 98,25%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program, dengan 5 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati, Selanjutnya kami sampaikan kinerja 8 Urusan Pilihan, sebagai berikut:**

**Urusan Kelautan dan Perikanan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp64,09 Miliar, realisasi fisik 89,07% dan realisasi keuangan 84,69%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 6 program, dengan 12 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 2 jenis penghargaan, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai Mitra Inovasi SDPPI Terbaik 2018 pada ajang Apresiasi Mitra Inovasi SDPPI Kategori Dukungan Penggunaan Perangkat dan Frekuensi Maritim Legal Tingkat Nasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta juara III Menu Balita pada Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-16 dalam rangka Hari Ikan Nasional ke-5 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Urusan Pariwisata**, dilaksanakan dengan anggaran Rp34,58 Miliar, realisasi fisik 97,01% dan realisasi keuangan 87,65%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 11 indikator kinerja program yaitu 9 indikator mencapai target dan 2 indikator belum mencapai

target, terkait dengan perubahan minat menginap ke desa wisata dan lamanya kegiatan wisata.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 5 jenis penghargaan, antara lain Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas mendapatkan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) Tahun 2018 Kategori Tata Kelola, Dieng Culture Festival mendapatkan Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2018 kategori Festival Pariwisata Terpopuler dan Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2018 oleh Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group, Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Gold di Bidang Investasi Pariwisata.

**Urusan Pertanian,** dilaksanakan dengan anggaran Rp221,08 Miliar realisasi fisik 95,08% dan realisasi keuangan 85,67%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 2 program, dengan 21 indikator kinerja program yaitu 12 indikator mencapai target dan 9 indikator belum mencapai target, terkait dengan serangan organisme pengganggu tanaman, alih komoditas dan musim.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Juara III UPJA pada event peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional ke 38 di Banjarmasin, oleh Usaha Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Karya Bersama Desa Megonten Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak.

**Urusan Kehutanan,** dilaksanakan dengan anggaran Rp51,96 Miliar, realisasi fisik 89,96% dan realisasi keuangan 81,39%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dengan 7 indikator kinerja program yaitu 6 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target, terkait dengan cara perhitungan PDRB untuk subsektor kehutanan.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Terbaik I Kategori Penyuluh Kehutanan pada Lomba Wanalestari tahun 2018 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15–19 Agustus 2018.

**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**, dilaksanakan dengan anggaran Rp36,56 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 87,18%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 5 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 2 jenis penghargaan, antara lain Juara I pada Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) kategori Penghematan Energi dan Air Pemerintah Daerah selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

**Urusan Perdagangan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp15,43 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,42%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 10 indikator kinerja program yaitu 7 indikator mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target, terkait dengan defisit neraca perdagangan.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 4 jenis penghargaan, yaitu penghargaan untuk eksportir dalam 2 kategori pada Primaniyarta Award dari Kementerian Perdagangan RI dan Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen Terbaik ke II serta Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik Nasional se Jawa-Bali dari Bank Indonesia.

**Urusan Perindustrian**, dilaksanakan dengan anggaran Rp19,18 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,74%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program, dengan 13 indikator

kinerja program yaitu 10 indikator mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target, terkait dengan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

**Urusan Transmigrasi**, dilaksanakan dengan anggaran Rp1,72 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85,49%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 2 indikator kinerja program, keduanya belum mencapai target, terkait dengan kebijakan penetapan kuota dari pemerintah pusat.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**  
Selanjutnya kami sampaikan kinerja **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.**

**Fungsi Perencanaan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp15,06 Miliar, realisasi fisik 94,17% dan realisasi keuangan 93,22%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 7 program, dengan 13 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

**Fungsi Keuangan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp47,23 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 89,80%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 2 program, dengan 6 indikator kinerja program yaitu 5 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target, terkait dengan penyelesaian sertifikasi bidang tanah.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 2 jenis penghargaan, yaitu Penghargaan predikat sangat baik kategori penyelenggara pelayanan publik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Penghargaan Penyusun dan Penyaji Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pada RAKERNAS Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018 dari Pemerintah Republik Indonesia.

**Fungsi Kepegawaian dan Diklat,** dilaksanakan dengan anggaran Rp55,46 Miliar, realisasi fisik 99,44% dan realisasi keuangan 86,34%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program dengan 4 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Prestasi yang diraih di tingkat nasional sebanyak 2 penghargaan, antara lain Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI sebagai Pemerintah Daerah Terbaik I dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018, dan Penghargaan dari Komisi Informasi, Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif dalam Implementasi UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Fungsi Penelitian dan Pengembangan,** dilaksanakan dengan anggaran Rp10,10 Miliar, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,43%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 8 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target.

Prestasi yang diraih yaitu Peringkat II Anugerah Iptek Budhipura Tingkat Nasional dari Kementrian Ristek dan Dikti.

**Fungsi Lainnya,** dilaksanakan dengan anggaran Rp191,06 Miliar, realisasi fisik 98,44% dan realisasi keuangan 89,50%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 8 program, dengan 23 indikator kinerja program yaitu 21 indikator mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target, terkait dengan penyelesaian perda dan ketentuan pelantikan Gubernur oleh Pemerintah Pusat.

Prestasi yang diraih di tingkat nasional sebanyak 15 penghargaan, antara lain Penghargaan dari KPK RI sebagai Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2017 dan 2018, Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Provinsi yang menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan dengan predikat "Memuaskan" Tahun 2018, dan Penghargaan dari LAN RI sebagai Pemerintah Daerah Terbaik I dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh 2 Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian, dengan anggaran seluruhnya Rp804,52 Miliar. Anggaran tersebut dikelola oleh 4 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk membiayai 8 program dan 31 kegiatan dengan realisasi fisik 97,64% dan keuangan 92,83%.

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kegiatan peningkatan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga telah menghasilkan sejumlah 132 kerja sama. Kerja sama antar daerah sejumlah 42 terdiri dari 35 perjanjian teknis, 3 kesepakatan bersama, dan 4 perjanjian kerja sama. Kerja sama dengan pihak ketiga



sejumlah 90 terdiri dari 22 kesepakatan bersama, 4 nota kesepahaman, 61 perjanjian kerja sama, dan 3 addendum perjanjian kerja sama.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sesuai Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) Provinsi, Forkompimda Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Jawa Tengah, untuk lebih mensinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat.

Kegiatan Penegasan Batas Daerah dan Penataan Batas Wilayah dilakukan melalui Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota dan Perapatan Pilar Batas Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasilnya antara lain: penegasan batas daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Kendal, Kesepakatan Bersama antara Kota Salatiga dengan Kab. Semarang tentang Batas Daerah Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang; dan kesepakatan antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang terkait dengan garis batas pada wilayah pemekaran kecamatan di Kabupaten Boyolali.

Pada Tahun 2018 tercatat telah terjadi 1.760 kali bencana yang berupa angin, banjir, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, erupsi, dan kekeringan yang menimbulkan kerugian Rp. 51,724 miliar. Bencana yang paling sering terjadi adalah bencana kebakaran 589 kali dan tanah longsor 555 kali. Kejadian bencana tersebut bersifat lokal, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong

dan memfasilitasi dalam rangka penguatan serta dukungan operasional penanganan darurat bencana.

Dalam hal ketentraman dan ketertiban di Jawa Tengah, selama Tahun 2018 terjadi aksi unjuk rasa sebanyak sebanyak 287 kali yang meliputi: permasalahan ideologi/politik sebanyak 7 kali, permasalahan ekonomi sebanyak 65 kali, permasalahan sosial 200 kali, permasalahan pendidikan 5 kali, permasalahan kesehatan 1 kali, permasalahan kamtibmas 9 kali dan permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah yang berpotensi menjadi sumber konflik sosial. Namun demikian kesemuanya tidak mempengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat di Jawa Tengah.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Capaian berbagai indikator makro pembangunan Jawa Tengah semakin membaik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, antara lain: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32%; PDRB Per Kapita meningkat sebesar 7,48%; inflasi yang rendah sebesar 2,82%; penurunan penduduk miskin 1,04% atau 330 ribu jiwa sehingga jumlah penduduk miskin Jawa Tengah menjadi 3,867 juta jiwa atau 11,19%; Pengangguran Terbuka 4,51% turun 0,06 poin dibandingkan dengan Agustus 2017 sebesar 4,57%; dan NTP 102,25 naik 1,85 poin dari NTP 2017 sebesar 100,40.

**Dari 452 Indikator Kinerja Program** yang ditargetkan Tahun 2018, sebanyak 409 indikator (91,09%) mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD maupun RPJMD, sebanyak 40 indikator (8,91%) belum mencapai

target dan 3 indikator belum bisa disajikan realisasi capaiannya karena menunggu rilis data dari BPS.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh berbagai macam penghargaan di Tingkat Nasional maupun Internasional yang merupakan bentuk pengakuan atas hasil kinerja yang telah kita laksanakan bersama. Ini semua berkat dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya para Pimpinan dan Anggota Dewan.

Meskipun kami, jajaran eksekutif telah berupaya keras dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, melalui pembangunan di berbagai bidang yang hasilnya telah kami laporkan di atas, kami menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kami mengajak pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta segenap *stakeholder* untuk senantiasa bersinergi serta bersama-sama *nyengkuyung* demi Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*”.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya.

**Wassalamu’alaikum Wr. Wb.**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**H. GANJAR PRANOWO, SH, MIP**